



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/9/436.1.2/2009**

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah untuk menjaga agar Peraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KETIGA** : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, berkewajiban menyampaikan usulan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Januari 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya;
2. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/9/436.1.2/2009
TANGGAL : 5 JANUARI 2009

RENCANA PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009

1. DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT KERJA/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Penanggulangan HIV/AIDS	Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan dan Sasaran Bab III Strategi dan Langkah-langkah Penanggulangan AIDS Bab IV Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Bab V Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Bab VI Peran dan Tanggung Jawab Pengidap HIV dan Penderita AIDS	V		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;	1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2. Dinas Kesehatan Kota Surabaya 3. Dinas Sosial 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 5. Bagian Hukum	Tahun 2009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<p>Bab VII Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV/AIDS</p> <p>Bab VIII Mekanisme Pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS</p> <p>Bab IX Sumber Dana</p> <p>Bab X Program dan Kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS</p> <p>Bab XI Ketentuan Penutup</p>			<p>6. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;</p> <p>8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 3/PER/MENKO/KESRA/1/II Tahun 2007 tentang Susunan, Tugas, dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;</p> <p>9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 7/PER/MENKO/KESRA/1/II Tahun 2007 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia Tahun 2007 – 2010;</p>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Perda	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Pelayanan Kesehatan Bab III Nama Objek dan Subjek Retribusi Bab IV Golongan Retribusi Bab V Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi		V	<p>10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh Indonesia.</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah</p>	<p>1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>2. Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan</p> <p>4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana</p> <p>5. Bagian Hukum</p>	Tahun 2009	Sebagai Pengganti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Bab VII Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Bab VIII Saat Retribusi Terutang Bab IX Sanksi Administrasi Bab X Tata Cara Pembayaran Bab XI Tata Cara Penagihan Bab XII Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XIII Keberatan Bab XIV Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XV Kedaluwarsa Bab XVI Tata Cara Penghapusan Piutang Bab XVII Ketentuan Penyidikan						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Perda	Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan	<p>Bab XVIII Ketentuan Pidana Bab XIX Ketentuan Penutup</p> <p>Bab I Ketentuan Umum Bab II Ketentuan Perizinan Bab III Nama Objek dan Subjek Retribusi Bab IV Golongan Retribusi Bab V Dasar Pengenaan Tarif Retribusi Bab VI Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VII Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Bab VIII Saat Retribusi Terutang Bab IX Sanksi Administrasi Bab X Tata Cara Pembayaran</p>		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2. Dinas Kesehatan Kota Surabaya 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 5. Bagian Hukum 	Tahun 2009	Sebagai Pengganti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Perda	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kota Surabaya	<p>Bab XI Tata Cara Penagihan</p> <p>Bab XII Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi</p> <p>Bab XIII Kedaluwarsa</p> <p>Bab XIV Ketentuan Penyidikan</p> <p>Bab XV Ketentuan Pidana</p> <p>Bab XVI Ketentuan Peralihan</p> <p>Bab XVII Ketentuan Penutup</p> <p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Bab II Bentuk Pelayanan Kesehatan</p> <p>Bab III Jenis Pelayanan Kesehatan</p> <p>Bab IV Izin dan Persyaratan Pelayanan Kesehatan</p>	V		<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan</p>	<p>1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>2. Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana</p> <p>4. Bagian Hukum</p>	Tahun 2009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Bab V Akreditasi dan Sertifikasi Pelayanan Kesehatan Bab VI Bentuk Kepemilikan Pelayanan Kesehatan Bab VII Pengaturan Investasi Asing Bab VIII Standart Pelayanan Kesehatan Bab IX Pembiayaan Kesehatan Bab X Fungsi Sosial Pelayanan Kesehatan Bab XI Peran Pemerintah Bab XII Ketentuan Penyidikan Bab XIII Ketentuan Pidana Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup						

2. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Perkoperasian	Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Pembentukan Bab IV Pembinaan dan Pemberdayaan Bab V Pembubaran Bab VI Sanksi Administrasi Bab VII Ketentuan Penutup	V		Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	1. Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 5. Bagian Hukum	Tahun 2009	
2.	Perda	Penataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro	Bab I Ketentuan Umum Bab II Penataan Tempat Usaha Bab III Tanda Daftar Usaha Bab IV Pemberdayaan		V	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1. Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tahun 2009	Sebagai Pengganti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Bab V Pengawasan dan Penertiban Bab VI Sanksi Administrasi Bab VII Ketentuan Penyidikan Bab VIII Ketentuan Pidana Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup				4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 5. Bagian Hukum		

3. DINAS KEBAKARAN KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Bab I Ketentuan Umum Bab II Pencegahan Umum Kebakaran Bab III Klasifikasi Jenis Kebakaran dan Penggunaan Alat Pencegah serta Pemadam Kebakaran Bab IV Persyaratan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Untuk Bangunan Rendah Bab V Persyaratan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Untuk Bangunan Tinggi		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 3. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan 4. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kebakaran 2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 4. Bagian Hukum 5. PLN 	Tahun 2009	Sebagai Pengganti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Bab VI Pemeriksaan dan Perizinan Bab VII Kewenangan Untuk Penanggulangan Kebakaran Bab VIII Pembinaan Bab IX Pengawasan Bab XI Ketentuan Pidana Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup						

4. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Pengelolaan Olahraga Unggulan	Bab I Ketentuan Umum Bab II Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bab III Ruang Lingkup Olahraga Bab IV Olahraga Unggulan Bab V Ketentuan Penutup	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Keolahragaan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemuda dan Olahraga 2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 3. Bagian Hukum 4. KONI Cabang Surabaya 	Tahun 2009	

5. DINAS PERTANIAN KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Usaha di Bidang Pemotongan Hewan dan Penjualan Daging	Bab I Ketentuan Umum Bab II Ketentuan Perizinan, Rekomendasi dan Surat Keterangan Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) Bab III Persyaratan Perizinan, Rekomendasi dan Surat Keterangan Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) Bab IV Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Bab V Syarat-syarat Tempat Penampungan dan Rumah Potong Hewan		V	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan kesehatan Hewan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner 5. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras	1. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 5. Bagian Hukum 6. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	Tahun 2009	Sebagai Pengganti Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan serta Penjualan daging Dalam Kotamadya Surabaya dan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas Kotamadya Tingkat II Surabaya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Bab VI Tata Tertib dalam Rumah Pemotongan Hewan Bab VII Hygiene Kesehatan Karyawan dan Lingkungan Rumah Potong Hewan Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Pelaksanaan Pemotongan Hewan Bab X Penentuan Mutu dan Penanganan Daging Bab XI Daging dari Luar Daerah Bab XII Pemasukan, Penampungan dan Pengeluaran Unggas Bab XIII Pemotongan Unggas dan Pengolahan Daging Unggas						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Bab XIV Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Daging Unggas Bab XV Pengangkutan, Penyimpanan dan Penjualan Daging Unggas Bab XVI Ketentuan Penyidikan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVII Ketentuan Lain-Lain Bab XVIII Ketentuan Penutup						

6. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Penyediaan Informasi Publik Bab III Hak dan Kewajiban Bab IV Tata Cara Perolehan Informasi Publik Bab V Kewajiban Pengguna Informasi Publik Bab VI Pembiayaan Bab VII Pengawasan Bab VIII Sanksi Administrasi Bab IX Ketentuan penyidikan Bab X Ketentuan Pidana Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup	V		1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Badan Kepegawaian dan Diklat 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4. Departemen Komunikasi dan Informatika 5. Bagian Hukum 6. Bagian Hubungan Masyarakat	Tahun 2009	

7. DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Izin Pemakaian Rumah Susun	Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Izin Pemakaian Rumah Susun Bab IV Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pemakaian Rumah Susun Bab V Pengawasan dan Pengendalian Bab VI Ketentuan Penyidikan Bab VII Ketentuan Pidana Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup	V		1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Rusun 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun	1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 3. Dinas Permukiman Provinsi Jawa Timur 4. Bagian Hukum 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Tahun 2009	

8. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Retribusi Perizinan Bangunan Gedung	Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama Objek dan Subjek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab V Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VI Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Bab VII Saat Retribusi Terutang Bab VIII Sanksi Administrasi Bab IX Tata Cara Pembayaran		V	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah	1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2. Dinas Permukiman Provinsi Jawa Timur 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 4. Bagian Hukum 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Tahun 2009	Sebagai Pengganti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Bab X Tata Cara Penagihan Bab XI Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XII Keberatan Bab XIII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XIV Kedaluwarsa Bab XV Tata Cara Penghapusan Piutang Bab XVI Ketentuan Penyidikan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Ketentuan Penutup						

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO